

**MAKNA POLITIK PEREMPUAN BAGI PIMPINAN  
WILAYAH AISYIYAH JAWA TIMUR PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dalam Bidang Ilmu Politik**



**Oleh :**

**FIITHROTUL AZIZAH  
NIM I91214016**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
JULI 2018**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fithrotul Azizah  
NIM : I91214016  
Program Studi : Ilmu Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

  
  
Fithrotul Azizah  
NIM. I91214016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : FITHROTUL AZIZAH  
NIM : I91214016  
Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul : **“Makna Politik Perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki sesuai dengan hasil munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar sarjana ilmu politik (S.IP) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 24 Juli 2018

Pembimbing



**Dr. Aniek Nrhayati. M.Si**  
NIP. 196909071994032001

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Fithrotul Azizah dengan judul “Makna Politik Perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 19 Juli 2018.

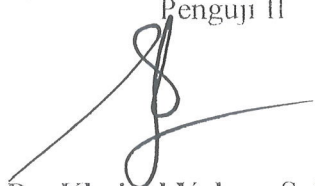
## TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.  
NIP. 196909071994032001

Penguji II



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197202062007101003

Penguji III



Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197411102003121004

Penguji IV



Moh. Ilyas Rolis, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197704182011011007

Surabaya, 25 Juli 2018

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA., M.Ag., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fithrotul Azizah  
NIM : I91214016  
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik  
E-mail address : fitrotulazizah111@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Makna Politik Perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

( Fithrotul Azizah )

## ABSTRAK

**Fithrotul Azizah, 2018.** *Makna Politik Perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018*, Skripsi Program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci :** *Politik Perempuan, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis makna politik perempuan bagi Pimpinan wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Hal ini dikarenakan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur memiliki pilihan politik yang berbeda dengan induk organisasinya, Muhammadiyah pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur menjelang pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam melihat makna politik perempuan adalah teori Tindakan Sosial Max Weber.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa; (1) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan politiknya, tidak mengikuti organisasi induknya, Muhammadiyah. Secara diplomasi mendukung Pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Hal tersebut dianalisis menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber, kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tipe tindakan rasional instrumental adalah bersinergi dengan KPU Jawa Timur untuk menyelenggarakan sosialisasi Pilgub Jawa Timur 2018. Selain itu, juga melakukan diskusi politik jelang Pilgub Jatim 2018 yang dihadiri oleh Pimpinan Wilayah. Penerimaan atas kedatangan Puti Guntur ke Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur dalam masa kampanye juga termasuk tipe tindakan rasional instrumental. Pada tipe kedua, yaitu rasional nilai, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur mengapresiasi program yang dibuat Puti Guntur bersama Syaifullah Yusuf, kemudian diajukan *Policy brief* apabila pasangan Gus Ipul dan Puti terpilih. Pada tipe ketiga, tindakan afektif, Aisyiyah dengan Gus Ipul sudah sejak lama memiliki kedekatan dengan Gus Ipul, dan memiliki gesekan dengan Khofifah sejak beliau menjadi menteri. Kemudian, emosi tersebut berdampak pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Pada tipe keempat, yaitu tindakan tradisional atau kebiasaan, dimana Pimpinan Wilayah Aisyiyah bersama jamaahnya memiliki agenda rutin mengadakan pengajian-pengajian dan kegiatan yang berkaitan dengan keperempuanan sebagaimana posisinya sebagai sayap perempuan organisasi Muhammadiyah. (2) Dalam partisipasinya Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur, PW Aisyiyah Jatim mengadakan sosialisasi diantaranya; bersinergi dengan KPU Jawa Timur, mengadakan diskusi Politik tentang Pilgub dan pilpres.





E. Teknik dan Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV AISYIYAH DAN POLTIK PEREMPUAN .....</b>	<b>53</b>
A. Mengenal Sejarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur dan Perkembangannya.....	53
1. Dinamika Aisyiyah Jawa Timur.....	55
2. Amal Usaha Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur .....	59
3. Struktur Organisasi Pimpina Wilayah Aisyiyah Jawa Timur...	61
4. Aisyiyah Jawa Timur dan Politik .....	64
B. Makna Pilihan Politik Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 .....	66
C. Sosialisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pilgub Jawa Timur 2018.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.<sup>1</sup>

Perkembangan berdemokrasi di daerah tumbuh luar biasa sejak lahirnya politik otonomi daerah yang bergulir begitu cepat. Seluruh kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan amanat undang-undang yang lahir di era reformasi. Provinsi Jatim menjadi salah satu provinsi yang akan berpartisipasi dalam pilkada di tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menetapkan dua pasangan calon sebagai peserta Pilgub Jawa Timur 2018. Penetapan ini berdasarkan hasil rapat pleno terbuka yang digelar di kantor KPU Jawa Timur.<sup>2</sup> Nomor urut satu (1) diisi pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dadark, diusung oleh enam (6) partai politik, diantaranya partai Nasdem, Golkar, Hanura, PPP, PAN dan Demokrat. Sedangkan nomor urut dua (2) diisi oleh

---

<sup>1</sup> Mirriam budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta:PT Gramedia pustaka Utama, 2008) , 461.

<sup>2</sup> Kpujatim.go.id diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, yang diusung oleh empat (4) partai politik, diantaranya PDI-P, PKB, Gerindra dan PKS.<sup>3</sup>

Ada dua fakta yang nampak dari kedua pasangan calon, pertama bahwa kedua calon gubernur sama-sama berasal dari kelompok Nadhiyin. Selain itu, kedua pasangan calon sama-sama ada unsur perempuannya. Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Mengenai perwakilan politik perempuan, hal ini dikuatkan dengan adanya kebijakan afirmasi yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.<sup>4</sup>

Indonesia dibentuk oleh dua ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi masyarakat tersebut adalah organisasi pendiri bangsa Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang. Gerakan dakwahnya selalu mewarnai dinamika perkembangan demokrasi Indonesia.

---

<sup>3</sup> <https://m.detik.com> diakses pada tanggal 9 Maret 2018.

<sup>4</sup> Ani Widya Sucipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Kompas, 2005), 59.

Dalam organisasi Nadhatul Ulama maupun Muhammadiyah masing-masing memiliki sayap perempuan, di NU ada Muslimat merupakan Badan Otonom yang melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU, selain itu juga ada Fatayat yang melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU. Muhammadiyah memiliki Badan otonom yang dinamakan Aisyiah yang bergerak di kalangan wanita dan ibu-ibu, sedangkan di kalangan perempuan-perempuan muda dijuluki Nasyyatul Aisyiyah.

Muslimat dan Aisyiyah adalah badan otonom organisasi tertua perempuan yang masih berkembang hingga sekarang dan memiliki peran besar dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menggunakan kedua badan tersebut sebagai bahan komparasi dalam penelitian ini.

Muslimat NU merupakan salah satu organisasi perempuan di lingkungan Nahdliyin, yang menjadikan NU sebagai organisasi induk. Dengan demikian maka dalam keorganisasiannya Muslimat NU, mempunyai prinsip keorganisasian yang sama dengan organisasi NU yaitu lebih berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan berupaya memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia. Dengan kata lain, NU menetapkan diri sebagai pengawal tradisi dengan mempertahankan faham *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fathurin Zen, *NU Politik Analisis wacana* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 15.

Muslimat NU mengeluarkan pernyataan resmi tentang keterlibatan dalam bidang politik pada tahun 1954, tepatnya saat berlangsungnya kongres I Muslimat NU yang berlangsung di Surabaya.<sup>6</sup> Alasan keterlibatan Muslimat NU dalam bidang politik adalah keinginan untuk menuntut persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan. Tuntutan persamaan hak dan kesempatan ini adalah manifestasi dari perjuangan untuk menegakkan keadilan, dalam bidang hukum, pendidikan, ekonomi dan tertib moral masyarakat melalui jalur politik formal. Hal ini dilakukan karena politik formal dipandang sebagai langkah yang sangat strategis dan programatik untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berupaya memposisikan kaum perempuan baik secara politik, hukum, maupun secara profesionalisme sederajat dengan kaum laki-laki.

Pada pilgub Jatim 2018, ketua umum pimpinan pusat muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa telah terdaftar menjadi calon Gubernur Jatim 2018 yang secara sah berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak. Ini menjadi salah satu data bahwa Muslimat NU secara terang-terangan melibatkan politik praktis dalam keorganisasiannya.

Pada Pilgub Jawa Timur tahun 2018, Ketua PW Muslimat NU Jawa Timur Masruroh Wahid menyatakan dukungannya kepada Khofifah Indar Parawansa sekaligus menjelaskan alasannya kenapa warga Muslimat harus mendukung Bu

---

<sup>6</sup> Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama, Negara, dan Bangsa (Jakarta: PP Muslimat NU, 1996), 70.

Khofifah, adalah karena kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Khofifah adalah sosok tauladan bagi jamaah Muslimat NU. Khofifah kerap menyampaikan kepada ibu-ibu Muslimat NU tentang alasannya maju menjadi bakal calon gubernur. Salah satu alasannya adalah untuk mengentas kemiskinan di Jawa Timur yang hingga saat ini masih menduduki peringkat pertama di Tanah Air. Angka kemiskinan perdesaan di Jawa Timur hingga saat ini masih di level 11,7 persen.<sup>7</sup> Khofifah Indar Parawansa juga mengatakan bahwa salah satu kekuatan politik nonpartai yang saat ini sedang dimaksimalan adalah Muslimat Nadhatul Ulama.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Muslimat NU, yang menyatakan diri secara terang-terangan sebagai organisasi yang bergerak selain di ranah sosial juga bergerak di ranah politik. Aisyiah adalah salah satu organisasi ortonom Muhammadiyah. Sebagai sebuah organisasi perempuan yang telah berkiprah cukup lama, dalam usianya yang berdiri hampir bersamaan dengan organ induknya. Aisyiyah memiliki nilai lebih sebagai sebuah organisasi yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Aisyiyah yang dilahirkan dari rahim Muhammadiyah bertujuan untuk memajukan kaum perempuan sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam. Sejak berdirinya Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan membina kaum perempuan dengan membentuk kelompok pengajian khusus perempuan di bawah

---

<sup>7</sup> <https://m.merdeka.com/politik/muslimat-nu-ungkap-alasan-dukung-khofifah-di-pilgub-jatim.html> diakses pada 13 Maret 2018.

<sup>8</sup> [Http://beritajowo.com](http://beritajowo.com) diakses pada tanggal 15 Maret 2018.

bimbingan beliau dan istrinya Nyai Walidah dengan nama “Sopo Tresno”. Selain itu KH. Ahmad Dahlan menggerakkan dan mengadakan kursus-kursus, pengajian khusus puteri dan turut membantu mendirikan sekolah puteri.<sup>9</sup>

Dalam usianya yang mencapai hampir satu abad, Aisyiyah tentu telah memiliki peranan yang cukup signifikan dalam memberdayakan perempuan di tanah air. Organisasi Aisyiyah telah memiliki 33 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (setingkat provinsi), 370 Pimpinan Daerah Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2332 Pimpinan Cabang Aisyiyah (setingkat kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting Aisyiyah (setingkat kelurahan).

Muhammadiyah sebagai organisasi induk dari Aisyiyah terkenal dengan amal usahanya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Seperti halnya Muhammadiyah, tidak sedikit amal usaha yang dimiliki Aisyiyah. Berdasarkan data yang dihimpun dari *Website* Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim, amal usaha organisasi ini di bidang pendidikan saja telah berjumlah 4560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Aisyiyah lebih banyak melakukan kegiatan amal usaha, dan tidak banyak berkecimpung di politik praktis. Pada tanggal 5 maret 2018 PP Aisyiyah

---

<sup>9</sup> Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 78.

<sup>10</sup> <http://www.Aisyiyah.or.id/modules/view/11> diakses pada 5 Maret 2018.



melaksanakan kegiatan yang dinamakan Islam Rumah Perempuan, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan materi dakwah kesehatan reproduksi dan gizi.<sup>11</sup>

“Aisyiyah adalah badan otonom Muhammadiyah yang menyatakan diri bukan bagian dari organisasi politik, hal itu tercantum pada PP Muhammadiyah no 41. Agenda kegiatan aisyiyah pada dipusatkan dalam aspek kesehatan, kesejahteraan, ekonomi dan sosial. Untuk di ranah politik praktis tidak.”<sup>12</sup>

Sebagai organisasi perempuan, Aisyiyah selalu mengedepankan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan. Salah satu contohnya adalah, gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan, yang dibahas pada Tanwir I Aisyiyah di Surabaya pada 19-21 Januari 2018. Program ini dibuat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia yang kemudian berdampak pada perempuan yang menjadi pengatur keuangan dalam keluarga.

Menjelang Pilgub Jawa Timur, wakil dari pasangan calon nomer dua ini melakukan silaturahmi ke PW Aisyiyah Jatim. Dalam pertemuan tersebut Puti juga mempromosikan program-programnya di pilkada Jawa Timur 2018. Disusun bersama calon gubernur Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), Puti Guntur

---

<sup>11</sup> [www.aisyiyah.or.id](http://www.aisyiyah.or.id) Diakses pada tanggal 14 Maret 2018.

<sup>12</sup> Retno, wawancara oleh peneliti, 18 Maret 2018.

menyampaikan salah satu program andalanya yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>13</sup>

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Retno, salah satu anggota Aisyiyah Wonocolo, mengatakan bahwa Aisyiyah sejauh ini membuka dengan tangan terbuka menerima mbak Puti di kantor Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur.

”Melalui Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, mengatakan bahwa Program dari pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur ini banyak memiliki kesamaan dengan visi dan misi Aisyiyah”<sup>14</sup>

Berdasarkan analisa dan data-data sederhana yang telah dipaparkan di atas menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk menganalisa lebih lanjut dan menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “MAKNA POLITIK PEREMPUAN BAGI PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH JATIM PADA PILGUB JATIM 2018”.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat luasnya cakupan studi kasus yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim maka perumusan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini terbatas pada pertanyaan berikut ini:.

---

<sup>13</sup> <http://liputan6.com> diakses pada 17 Maret 2018.

<sup>14</sup> Retno, wawancara oleh peneliti, 18 Maret 2018.



- b. Dalam rangka pengembangan ilmiah terkait sosialisasi politik Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim pada Pilgub Jatim 2018.

## 2. Manfaat Praktis

- a. menjadi sumbangsih pemikiran bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim
- b. mengembangkan sosialisasi politik Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim pada pilkada-pilkada selanjutnya.

## 3. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya kepada mahasiswa Prodi Ilmu Politik sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi khasanah intelektual, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembelajaran di penelitian-penelitian berikutnya.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Definisi Makna**

Makna menurut Max Weber berasal dari interaksi yang timbul karena proses adanya tindakan sosial. Tindakan ini bermakna jika yang merespon itu memahami apa yang kita lakukan, itu berarti kedua belah pihak saling memahami makna. Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses aktor yang terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah

dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang di tujukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang.

## **2. Politik Perempuan**

Membicarakan soal perempuan, tidak terlepas dengan peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Terlebih apabila dikaitkan dengan politik. Politik merupakan lembaga yang paling dominan membentuk struktur sosial. Keputusan di bidang apapun berada di tangan lembaga ini. Seperti keputusan yang menyangkut lembaga hukum, keluarga dan sosial. Tidak terkecuali dalam putusan ini, peranan dan kedudukan perempuan dalam masyarakat juga ditentukan lembaga politik. Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab perempuan dalam hidup bermasyarakat tidak terlepas dari peraturan institusi politik.<sup>15</sup>

Keberadaan perempuan tidak diuntungkan karena sudut pandang dan perlakuan yang tidak adil. Elit politik memandang kaum perempuan sebaiknya diletakkan pada pekerjaan domestik, karena hal itu sesuai dengan kodratnya. Perempuan dikatakan tidak memiliki ketertarikan terhadap politik (jika ada yang berminat tidak diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki), perempuan juga lebih banyak memikirkan kecantikan diri dari pada persoalan politik, dan perempuan bertugas mengurus rumah tangga

---

<sup>15</sup> Nunuk P Muniarti, *Getar Gender*, (Magelang: IndoesiaTara, 2004), 136.

dan mengasuh anak. *Sterotipe* negatif mengenai ciri khas perempuan dianggap sebagai kodrat yang harus diterima.

### 3. Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim adalah Pengurus pusat Aisyiyah di Provinsi Jawa Timur yang menaungi 38 Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) di Jawa Timur. Dalam pemilihan ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur melalui musyawarah wilayah yang digelar di Asrama Haji, 4-5 Desember 2015 menggunakan sistem pemilihan suara terbanyak secara elektronik. Diikuti oleh 350 kader yang terdiri dari utusan pimpinan daerah dan pengurus wilayah.

Dalam struktur kepengurusannya, tentu saja hanya diisi oleh perempuan saja. Berikut strukturnya:

Penasehat	: dr. Esty Martiana Rachmie
Ketua	: Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag
Wakil Ketua I	: Dra. Hj. Rukmini
Wakil Ketua II	: Dra. Hj. Noer Haidah
Wakil Ketua III	: Dr. Hj. Sugiarti, M. Si
Wakil Ketua IV	: Sumiati, S. Ag.
Sekretaris	: Dra. Hj. Nelly Asnifati
Wakil Sekretaris I	: Dr. Akhtim Wahyuni, M. Ag,
Wakil Sekretaris II	: Nur 'Aini, S. Pd,
Bendahara	: Hj. Heni Mardiningsih, SE
Wakil Bendahara	: Dr. Dra. Hj. Anna Mariana, M. Si. Ak. Ca
Majelis Tabligh	: Dra. Hj. Faridah Muwafiq
Majelis Pendidikan Dasar dan menengah	: Dra. Hj. Siti Asmah, M. Pd
Majelis Kesehatan	: dr. Sophiati Sutjahjani, M. Kes



Majelis Kesejahteraan sosial	: Budiwati, S. Pd
Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan	: Dra. Ec. Tatik Lutfiati, ST
Majelis Pembinaan Kader	: Ir. Hafifah Imtihanah
Majelis Hukum dan HAM	: Hj. Arini Jauharoh, S.H.,M.Kn
Lembaga Kebudayaan	: Dra. Hj. Suharti, M. Psi
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah	: Dwi Endang Purwanti. SS

### c. Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

Pemilihan Gubernur 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Dua pasangan calon kepala daerah maju dalam Pilkada Jawa Timur. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa berpasangan dengan Emil Dadark dan Syaifullah Yusuf berpasangan dengan Puti Guntur Soekarnoputri. Kedua pasangan resmi mendaftar sebagai calon kepala daerah Jawa Timur ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur. Tak ada pasangan calon yang mendaftar jalur perseorangan.

#### 1. Khofifah Indar Parawansa –Emil Dadark

Pasangan ini diusung oleh koalisi enam partai politik, yaitu Demokrat (13 kursi DPRD), Golkar (11 kursi), Nasdem (4 kursi), PPP (5 kursi), Hanura (2 kursi), PAN (7 kursi). Total 42 kursi DPRD.

Khofifah sudah dua kali maju dalam Pilkada Jatim sebagai calon gubernur, yakni tahun 2008 dan 2013, namun kalah dengan pasangan Soekarwo-Gus Ipul. Sejak tahun 2014, ia menjabat Menteri Sosial.

Khofifah pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan (1999-2001). Sebelumnya ia menjabat anggota DPR dari fraksi PPP (1992-1999) dan anggota DPR dari fraksi PKB (1999-2009). Ia juga pernah menjabat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Di Nadhatul Ulama (NU), Khofifah kini menjabat Ketua Muslimat NU.

Emil Dardak kini menjabat Bupati Trenggalek sejak 2016. Sebelum maju di Pilkada Jawa Timur, Emil adalah kader PDI Perjuangan.

## 2. Syaifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarnoputri

Pasangan ini diusung koalisi empat partai, yaitu PKB (20 kursi DPRD Provinsi), PDI-P (19 kursi), PKS (6 kursi) dan Gerindra (13 kursi). Total 58 kursi DPRD.

Gus Ipul menjabat Wakil Gubernur Jatim sejak 2009. Sebelumnya, ia menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI-P (1999-2002) dan Fraksi PKB (2002-2004). Pernah menjadi ketua GP Ansor dua periode, yaitu pada 2001-2005 dan 2005-2010.

Puti Guntir adalah cucu dari Presiden Pertama RI Soekarno dari anak pertamanya, yakni Guntur Soekarnoputra. Sekarang menjabat anggota DPR dari Fraksi PDI-P sejak 2009 hingga sekarang.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya dalam bentuk tiga jurnal dan dua skripsi dengan tema yang berkaitan dengan perempuan, pemimpin dan politik.

1. Jurnal karya Siti Ruhaini Dzuhayatin tahun 2009, yang berjudul “*Menakar ‘Kadar Politis’ Aisyiyah.*” Jurnal tersebut memaparkan bahwa Aisyiyah berada dalam dua pilihan yaitu, pertama, bertahan menjadi organisasi yang bertumpu pada isu-isu praktis semata dengan konsekuensi dicap sebagai organisasi “status quo” dan konservatif. Kedua, Aisyiyah harus seperti himbauan Tri Hastuti, membuka diri terhadap ketidakadilan yang ada dalam masyarakat daripada mengkonservasi “idealisisasi keluarga sakinah”. Ketiga, Aisyiyah harus keluar dari rutinitas administrative yang memang banyak menyita energi sebagai organisasi besar. Keempat, Aisyiyah harus merespon isu-isu strategis perempuan, baik nasional maupun internasional. Secara nasional, Akan tetapi, yang pastinya Aisyiyah harus kritis terhadap kebijakan Negara yang propasar bebas yang menyengsarakan buruh perempuan.<sup>16</sup>
2. Jurnal karya Amaliatul Walidain tahun 2017, yang berjudul “*Peran dan Partisipasi Politik Organisasi Nasyiatul Aisyiyah Dalam Menginternalisasikan Kebijakan Berperspektif Gender Di Kota Palembang*”

---

<sup>16</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, “*Menakar ‘Kadar Politis’ Aisyiyah.*” Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto. Vol 4 No. 2. (Juli-Desember 2009)

*Tahun 2017*". Jurnal tersebut membahas tentang peran partisipasi politik organisasi Nasyyatul Aisyiyah dalam menginternalisasi perspektif gender kebijakan di Kota Palembang, melalui program organisasi internal seperti Family Learning Center dengan penguatan kelembagaan dan kader, agar memiliki kapasitas dalam menanggapi masalah Perempuan sebagai bagian dari masyarakat kebijakan.<sup>17</sup>

3. Jurnal karya Hikmawan Syahputra tahun 2014, yang berjudul "*Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014*". Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Di hadapan Negara / pemerintahan, Muhammadiyah selalu mengembangkan sikap memerintahkan yang baik dan melarang kejahatan dalam arti memberi dukungan positif kebijakan, jika tidak mengkritik secara bijaksana terhadap kebijakan yang tidak dianggap baik. Memasuki kedua abad seusianya, yang berawal dari Kongres ke-46 tahun 2010 hingga akhir 2014, Muhammadiyah akan terus membangun bangsa dengan meningkatkan peran kebangsaan masyarakat, Negara dan bangsa. Melaksanakan peran komitmen nasional untuk mencalonkan Awal, zaman sekarang Muhammadiyah melakukan kegiatan tersebut; Pertama, meningkatkan pemberdayaan, pembinaan, pengembangan dan pendidikan politik, kedua, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi kebangsaan sebenarnya dari masalah dan isu kontemporer kebangsaan, ketiga,

---

<sup>17</sup> Amaliatul Walidain, "*Peran dan Partisipasi Politik Organisasi Nasyyatul Aisyiyah dalam Menginternalisasikan Kebijakan Berperspektif Gender di Kota Palembang Tahun 2017*," Jurnal Pemerintahan dan Politik. Volume 2 No. 1. (Januari 2017).

memperkuat jaringan, komunikasi dan hubungan antara organisasi dan instansi pemerintah, dan yang keempat, meningkatkan fungsi advokasi termasuk tindakan dan pelayanan untuk kepentingan umum.<sup>18</sup>

4. Skripsi karya Ilma Afianti Cahyaningtyas pada tahun 2017 yang berjudul *“Peranan aktivis organisasi masyarakat berbasis keagamaan dalam pemilihan Bupati Lamongan 2015: studi kasus aktivis pimpinan cabang Aisyiyah dan aktivis pimpinan anak cabang Muslimat di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”*.<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa pada Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2015, baik Muslimat maupun Aisyiyah memiliki peranan penting sebagai organisasi perempuan. Muslimat yang sangat antusias menodorong anggota untuk aktif berpartisipasi pada pemilihan bupati, hal tersebut dikarenakan Muslimat sendiri bangga memiliki kader yang maju menjadi kandidat calon wakil Bupati. Sedangkan peranan yang dilakukan Aisyiyah melalui metode dakwah, metode ceramah yang selanjutnya dengan diskusi dan dialog. Adanya tukar pemikiran dan saling berbagi pendapat mengenai siapa kandidat calon yang dipilih dan bagaimana visi misinya.

5. Skripsi karya Jajang Kurnia pada tahun 2011 yang berjudul *“Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam Pemberdayaan Politik Perempuan”* Karya

<sup>18</sup> Hikmawan Syahputra *“Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014”* Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, (2014).

<sup>19</sup> Ilma Afianti Cahyaningtyas. *“Peranan Aktivis Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan dalam Pemilihan Bupati Lamongan 2015 : Studi Kasus Aktivis Pimpinan Cabang Aisyiyah dan Aktivis Pimpinan Anak Cabang Muslimat di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.”* (Digilib UINSBY, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Ilmu Politik, 2017)

Jajang Kurnia ini menjelaskan mengenai peran organisasi Pimpinan Pusat Aisyiyah bagi kemajuan perempuan di tanah air agar tidak terdiskriminasi dalam pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Adapun kegiatan pemberdayaan politik perempuan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang terbaru di era reformasi saat ini seminar, workshop, kajian-kajian, penerbitan buku, kampanye, terangkum dalam bentuk pendidikan politik perempuan. Tidak hanya itu pelatihan kepemimpinan dan pendidikan kelurga sakinah yang sudah ada sejak dahulu masih tetap berlangsung bertujuan memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada perempuan akan perlunya peran perempuan di masyarakat.<sup>20</sup>

Demikian pembahasan dari kelima karya ilmiah tersebut belum membahas masalah yang berkaitan dengan makna politik perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut tentang makna politik perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim, yang tertuang dalam judul "Makna Politik Perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim pada Pilgub Jatim 2018"

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan bab-bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Jajang Kurnia "*Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam Pemberayaan Politik Perempuan.*" (Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, 2011)



Bab I : Pada bab ini mengenai pendahuluan seperti latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi konseptual.

Bab II : Pada bagian ini berisi penelitian terdahulu, selain itu penulis mengkaji teori-teori yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, yakni Teori tindakan sosial Max Weber, sosialisasi politik dan politik perempuan di Indonesia.

Bab III : Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi, diantaranya jenis penelitian, tempat penelitian, waktu dan tahap-tahap penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data dan sistematika pembahasan.

Bab IV : Pada bab ini akan membahas hasil penelitian mengenai makna politik perempuan bagi PWA Jatim yang meliputi: mengenal sejarah PWA Jatim, makna PWA Jatim tentang politik perempuan, dan sosialisasi PWA Jatim pada Pilgub Jatim 2018.

Bab V : Pada bab terakhir ini penulis membuat suatu kesimpulan penulisan ilmiah ini dan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan baik untuk objek yang diteliti maupun bagi kalangan akademis (mahasiswa dan dosen) apabila ingin menelaah lebih lanjut terhadap konsen ini.

## BAB II

### MAKNA DAN SOSIALISASI POLITIK PEREMPUAN

#### A. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Menurut Max Weber, tindakan sosial ialah perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Bagi Weber tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berfikir dan kesengajaan. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain.

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.<sup>21</sup> Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya). Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

---

<sup>21</sup> George Ritzer, *Sosiolog Ilmu Berparadigma Ganda*. Terjemahan Alimandan. (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 38.

Ada 5 ciri pokok Tindakan sosial menurut Max Weber sebagai berikut:

- a. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata
- b. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- c. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial bisa individu tetapi juga bisa kelompok atau sekumpulan orang.

Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe yaitu:<sup>22</sup>

- a. Tindakan rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang

---

<sup>22</sup> Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 19.

berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya: Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang kesekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

b. Tindakan rasional nilai (*Werk Rational*)

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh : perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

c. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (*Affectual Action*)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja

yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga bias berarti.

d. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (*Traditional Action*)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Tindakan pulang kampung disaat lebaran atau Idul Fitri.

## B. Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.<sup>23</sup>

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan

---

<sup>23</sup> Mirriam, Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 406.

sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Berger<sup>24</sup> bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam suatu proses politik, sosialisasi politik menjadi suatu hal yang penting karena terdapat keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi dalam sebuah proses politik. Menurut Almond dan Verba, dalam, secara luas sosialisasi politik merupakan transmisi dari budaya politik kepada generasi yang baru di suatu masyarakat tertentu.

Definisi yang hampir serupa juga diungkapkan pula oleh Mas'ood,<sup>25</sup> yang mengungkapkan bahwa sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Dengan sosialisasi politik suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya, proses ini disebut tranmisi kebudayaan. Sosialisasi politik merupakan produk dari fenomena mikro dan makro yang saling bertautan. Pertanyaan mendasar pada level makro dalam penelitian sosialisasi politik adalah bagaimana masyarakat politik mewariskan nilai-nillai, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan pendapat-pendapat serta perilaku kepada masyarakat? Studi sosialisasi politik pada level mikro mempertanyakan: bagaimana dan mengapa orang-orang menjadi warga Negara? Pada level makro sistem politik, sosialisasi politik merupakan alat

---

<sup>24</sup> Sutaryo, *Dasar-dasar Sosialisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 156.

<sup>25</sup> Mas'ood, Mohtar, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 40-41.

yang digunakan masyarakat politik untuk menanamkan norma-norma dan praktek-praktek yang tepat kepada warganya. Sedangkan pada level mikro, sosialisasi politik merupakan pola-pola dan proses yang dilalui individu dalam melibatkan diri dalam pembangunan dan pembelajaran politik, membentuk konteks yang khusus dengan lingkungan politik tempat tinggalnya. Pengertian sosialisasi politik menurut Wright adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.

Menurut Koirudin,<sup>26</sup> sosialisasi politik adalah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Setiap masyarakat mempunyai cara-cara untuk mensosialisasikan penduduknya di dalam kehidupan politik. Biasanya proses sosialisasi berjalan berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa.

Greenstein,<sup>27</sup> menjelaskan pengertian sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas, yaitu:

- a. Dalam arti sempit adalah penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab.

<sup>26</sup> Koiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 49.

<sup>27</sup> Rush, M. Dan Althof. P, *Pengantar Sosilogi Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 35-36.



- b. Sedangkan dalam arti luas adalah semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi. Menurut David Easton dan Jack Dennis,<sup>28</sup> sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya.

Sosialisasi politik menurut Syarbaini, dkk.<sup>29</sup> Adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Ibid,

<sup>29</sup> Syarbaini, Syahril dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan dan Kewarganegaraan* (Jakarta, UIUE-University Press, 2004), 71.

Dari beberapa pandangan ahli di atas setidaknya terdapat kesamaan yang menunjukkan bahwa pada dasarnya sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik dengan demikian juga menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Terdapat berbagai jenis sosialisasi politik, dan apabila dikaitkan dengan prosesnya sosialisasi dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu:

- a. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
- b. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan, dan diatur secara formal.

Sedangkan berdasarkan tipenya, jenis-jenis sosialisasi oleh Syarbaini, dkk.

Dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan Negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- b. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum.

### **C. Politik Perempuan di Indonesia**

Peran politik perempuan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru atau asing bagi masyarakat Indonesia. Penjelasan mengenai perjalanan cakupan ruang politik perempuan di Indonesia pastilah berbeda-beda disetiap





pada tahun 1942, tongkat kolonialisasi diserahkan kepada Jepang. Walaupun menjajah dalam waktu singkat sekitar tiga tahun, namun waktu itu dirasakan cukup lama oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pergerakan perempuan di tanah air. Semua organisasi pergerakan Indonesia dibubarkan, kemudian Jepang membentuk organisasi baru yang dapat membantu tercapainya kemenangan Jepang melawan sekutu.<sup>35</sup> Organisasi-organisasi wanita melebur menjadi satu ke dalam organisasi wanita yang dibuat oleh Jepang yakni Gerakan Istri Tiga A, Barisan Pekerja Perempuan Putera, Jawa Hokokai Fujinkai.

Organisasi-organisasi wanita pada masa pendudukan Jepang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian-bagian dari organisasi umum tadi.<sup>36</sup> Selain berdampak negatif karena ruang gerak organisasi perempuan dibatasi misalnya tidak mendapat kedudukan wanita dalam hukum perkawinan dan hak untuk memilih tidak lagi terdengar.<sup>37</sup> Adapula dampak positif diantaranya para perempuan dilatih militer dan Palang Merah. Harapan Jepang mengambil kekuatan para pimpinan nasional Indonesia untuk kepentingan kekuasaannya, sebaliknya pimpinan nasional memanfaatkan sarana Jepang untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. seperti yang dilakukan oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito yang pada waktu itu dipercayai Jepang untuk memimpin

---

<sup>35</sup> A Adaby Darban, *Aisyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM, 2010), 95.

<sup>36</sup> Ibid, 96.

<sup>37</sup> Ibid, 97.

organisasi Fujinkai. Membuat maklumat pembubaran dan diganti dengan Persatuan Wanita Indonesia dan bergerak ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota.<sup>38</sup>

17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Pada fase awal kemerdekaan ini perjuangan melawan penjajah masih bergejolak karena mereka belum menerima kemerdekaan Indonesia. Lagi-lagi kaum perempuan tidak berpangku tangan, mereka juga terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak terkecuali Aisyiyah.

Setelah perang kemerdekaan usai dan terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Tak ada lagi Belanda, tak ada lagi Jepang, tak ada lagi musuh bersama. Laki-laki menguasai panggung politik sedangkan perempuan diposisikan pada tugas-tugas sosial.<sup>39</sup> Pada masa ini bermunculan organisasi-organisasi perempuan yang di bidang politik diantaranya Gerakan Wanita Indonesia Sedar (1950) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, Wanita Demokrat Indonesia (1951) berafiliasi dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan Wanita Nasional (1953) merupakan afiliasi dari Partai Indonesia Raya (PIR).<sup>40</sup> Pengaruh Gerwani dalam Kowani terasa begitu kuat, sehingga hal ini memiliki pengaruh terhadap Aisyiyah yang juga menghimpun di dalamnya. Aisyiyah yang merupakan organisasi keagamaan dan non politis, akhirnya menjaga jarak

<sup>38</sup> Ibid, 101.

<sup>39</sup> Olvi Pristiana, Zulminarti, dan Chamsiah Djamal, *Wanita dan Organisasi*, Toeti Herati dan Aida Vitalaya S. Hubies, *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional*, dalam A. Adaby Darban, *Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM, 2010), 112.

<sup>40</sup> Ibid, 112.



dengan Kowani berbeda dengan Gerwani yang tujuan utama pergerakannya adalah politik.<sup>41</sup>

Pada masa kemerdekaan perkembangan peran politik perempuan di Indonesia dapat pula ditinjau berdasarkan presentase kaum perempuan dalam menduduki lembaga-lembaga politik misalnya DPR RI. Walaupun jumlah perempuan Indonesia lebih banyak yakni 101.628.816 jiwa atau 51% dari penduduk Indonesia,<sup>42</sup> namun kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi anggota parlemen masih berbanding jauh dengan laki-laki. Jumlah perempuan yang terpilih dalam parlemen selalu berkisar antara 8% sampai 10% saja. Di bawah ini jumlah anggota DPR RI berdasarkan jenis kelamin sejak era orde lama sampai reformasi.<sup>43</sup>

Tabel 1.1

Prosantase Anggota DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin

Periode	Perempuan	Laki-laki
1955-1960	17 (63%)	272 (93,7%)
1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)

<sup>41</sup> A. Adaby Darban, *Aisyiyah dan Sejarah*, 114.

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik 2001 dalam Endis Firdaus, *Imam Perempuan, Dekonstruksi Perspektif Gender Menuju Kontekstualisasi Politis Ajaran Islam di Indonesia* (Jakarta-Bandung: Pustaka Ceria, 20018), 236.

<sup>43</sup> Ani Widya Sucipto, 239.

1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	40 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)
2009-2014	101 (17,68%)	459 (82,32%)
2014-2019	97 (17,32%)	463 (82,68%)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2

Prosantase Anggota DPRD Jawa Timur 2009-2014

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Partai Politik

No	Partai	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	%
1	PD	15	68,2	7	31,8	22	22
2	PDIP	14	82,3	3	17,7	17	17
3	PKB	10	76,9	3	23,5	13	13
4	Golkar	10	90,9	1	9,1	11	11
5	Gerindra	7	87,5	1	12,5	8	8
6	PAN	7	100	0	0	7	7
7	PKS	7	100	0	0	7	7
8	PKNU	5	100	0	0	5	5

9	Hanura	2	50	2	50	4	4
10	PPP	3	75	1	25	4	4
11	PDS	1	100	0	0	1	1
12	PBR	1	100	0	0	1	1
Total		82	82	18	18	100	100

Sumber : Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur 2009-2014

Pemilu 2009 menghasilkan jumlah anggota DPRD Jawa Timur 20199 2014 sebagaimana tergambar pada Tabel 1.2. secara umum, Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah perempuan di DPRD Jawa Timur tahun 2009-2014 masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Dari 100 orang total anggota DPRD Jawa Timur, 18 orang diantaranya perempuan (18%). Persentase ini masih jauh dari harapan yang ingin dicapai UU Pemilu yaitu 30% jumlah kursi di DPR/D.<sup>44</sup>

Meskipun demikian, dibandingkan dengan periode sebelumnya (2004-2009), terlihat adanya peningkatan jumlah anggota perempuan. pada periode sebelumnya, jumlah perempuan ada 16 orang (16%) seperti yang terlihat pada Tabel 1.3. ini berarti jumlah perempuan di DPRD Jawa Timur meningkat sebesar 12,5%.

<sup>44</sup> Wahidah Zein, "Perempuan Di DPRD Jawa timur 2009-2014", Jurnal Sosiologi Islam, vol. 1, No.2, Oktober 2011.

Tabel 1.3

## Prosantase Anggota DPRD Jawa Timur 2004-2009

## Berdasarkan Jenis Kelamin dan Partai Politik

No	Partai	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	%
1	PKB	24	77,4	7	22,6	31	31
2	PDIP	21	87,5	3	12,5	24	24
3	Golkar	13	86,7	2	13,3	15	15
4	PD	7	70	3	30	10	10
5	PPP	7	87,5	1	12,5	8	8
6	PAN	7	100	0	0	7	7
7	PKS	3	100	0	0	3	3
8	PBB	1	100	0	0	1	1
9	PDS	1	100	0	0	1	1
Total		84	84	16	16	100	100

Sumber : Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur 2009-2014

Tabel 1.4

Kepala Daerah Tingkat Kabupaen/Kota berdasarkan Jenis Kelamin

Provinsi	Jenis Kelamin				Perseorangan
	Bupati/Walikota		Wabup/Wawali		
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	23	0	22	1	1
Sumatera Utara*	33	0	29	1	1
Sumatera Barat*	19	0	18	0	0
Riau	12	0	12	0	0
Jambi	11	0	11	0	0
Sumatera Selatan*	15	1	14	1	0
Bengkulu*	10	0	8	1	1
Lampung*	15	0	12	0	1
Kep. Bangka Belitung*	7	0	6	0	0
Kepulauan Riau	7	0	7	0	0
DKI Jakarta	6	0	6	0	0
Jawa Barat*	24	3	24	0	1
Jawa Tengah*	33	2	28	3	0
D I Yogyakarta	3	2	4	1	0
Jawa Timur*	35	3	34	3	1
Banten	7	1	6	2	0
Bali	8	1	9	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	0	10	0	1
Nusa Tenggara Timur	22	0	22	0	2
Kalimantan Barat	13	1	14	0	1
Kalimantan Tengah	14	0	12	2	1
Kalimantan Selatan*	13	0	12	0	0
Kalimantan Timur*	9	1	9	0	0
Kalimantan Utara	5	0	5	0	0
Sulawesi Utara*	13	2	13	1	0
Sulawesi Tengah*	12	0	11	0	0
Sulawesi Selatan*	24	0	22	1	0
Sulawesi Tenggara*	13	0	10	2	0
Gorontalo*	6	0	4	0	1
Sulawesi Barat*	6	0	5	0	0
Maluku	8	0	6	2	0
Maluku Utara	9	0	8	1	0
Papua Barat*	13	0	10	1	0
Papua*	29	0	27	0	0
<b>Total</b>	<b>487</b>	<b>17</b>	<b>450</b>	<b>23</b>	<b>12</b>

Sumber: Diolah dari Kementerian dalam Negeri (November 2013)

Catatan : Jumlah wabup/wawali tidak sama dengan jumlah bupati/walikota karena adanya wilayah kabupaten/kota yang wabup/wawali berhalangan tetap

Menjadi suatu keniscayaan bagi kaum perempuan agar dapat terlibat lebih jauh dan aktif dalam mengisi kemerdekaan dan memperoleh hasil maksimal dari pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah apabila kaum perempuan tidak dapat berpartisipasi lebih banyak dalam menentukan kebijakan. Walaupun UU *Affirmative Action* yang memperjuangkan kuota perempuan sebesar 30 % dalam parlemen belum juga memperoleh hasil yang maksimal, namun sejarah mencatat Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan dalam iklim politik yang lebih demokratis.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian (*research*) merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.<sup>45</sup> Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

#### A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengertian penelitian kualitatif yakni penelitian yang datanya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka-angka. Sedangkan penggunaan metode deskriptif memiliki arti sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ikhwal masalah atau objek tertentu secara rinci, biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan secara rinci.<sup>46</sup>

Alasan peneliti menggunakan metode penulisan kualitatif dikarenakan dari sifat masalah yang diteliti, dalam penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang kompleks.

---

<sup>45</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 1.

<sup>46</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), 166.



Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana makna politik perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim. Peneliti berusaha menuliskan secara deskriptif makna politik perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim pada pilgub Jawa Timur tahun 2018.

## **B. Tempat Penelitian**

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur yang beralamat di Jl. Kertomenanggal IV No.1 Dukuh Menanggal, Gayungan, Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fokus penelitian mengenai makna politik perempuan bagi PWA Jawa Timur.

Selain itu, peneliti juga menyesuaikan tempat yang sudah ditentukan oleh informan dalam melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara di lokasi sebagai berikut :

1. Wawancara dengan Bu Siti Dalilah Candrawati, di Hotel Tanjung Surabaya
2. Wawancara dengan Bu Nelly Asnifati, di Kantor Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur.
3. Wawancara dengan Bu Zubaidah, di Kantor Pimpinan Daerah Aisyiyah Sidoarjo.
4. Wawancara dengan Bu Dita, di Villa Wahyu, Trawas
5. Wawancara dengan Bapak Fajar Muharrom, di Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

6. Wawancara dengan Bu Retno, di rumahnya, Wonocolo gang VII Surabaya.

### **C. Waktu dan Tahap-Tahap Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama beberapa bulan, dimulai pada bulan April-Juli 2018 yang mana dimulai pada saat mencari data di Anggota Aisyiyah Wonocolo, Di Kantor PWA Jatim, Pengurus Daerah Aisyiyah Sidorajo dan Mojokerto dan di Villa Wahyu, Trawas.

Tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari anggota Aisyiyah dan media mainstream.
2. Proposal penelitian sebagai lanjutan dari judul yang sudah diterima oleh ketua prodi untuk dijadikan penelitian, selanjutnya peneliti mengajukan proposal kepada dosen pembimbing untuk diperiksa, sampai bisa diujikan dan jika proposal sudah diterima maka peneliti telah mendapatkan izin dan bisa melakukan penelitian.
3. Seminar proposal yakni lanjutan sesudah mengajukan proposal penelitian dan jika sudah diberi izin oleh dosen pembimbing untuk diujikan dan dijadwalkan oleh ketua prodi untuk diadakan seminar proposal.
4. Penulisan dan pembahasan yakni lanjutan sesudah seminar proposal dan melakukan penelitian, setelah itu mencari data untuk dianalisis

terhadap jawaban yang sudah diwawancarai. Bila sudah ada jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang sudah dianggap kredibel.

#### **D. Sumber Data**

Data-data penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber data diantaranya :

##### 1. Data primer yang akan diperoleh melalui:

Menurut Johannes Supranto bahwa yang dimaksud dengan data primer ialah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi langsung melalui objeknya, yakni data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara.<sup>47</sup>

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan langsung secara lisan dengan informan guna memperoleh keterangan dalam mendukung data yang terkumpul.

Informan yang dipilih sebagai sampel berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau informasi mempunyai relevansi yang erat dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih pertama atau *key informan* kemudian peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan). Hal

---

<sup>47</sup> Johannes Supranto, *Metode Riset Aolikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 20-21.

ini dilakukan dengan maksud agar informasi yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap memahami fenomena yang ada, dan yang dipandang mengerti dan memahami kehidupan individu-individu sebagai anggota masyarakat lokasi penelitian.

## 2. Data sekunder

Sukmadinata menjelaskan jika yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan arsip-arsip yang berkaitan dengan topic data yang akan diteliti dengan metode penulisan kualitatif.<sup>48</sup>

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian, diantaranya buku, modul, laporan pertanggungjawaban, dan sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid atau memungkinkan sesuai dengan data yang dihimpun maka teknik yang digunakan antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Wawancara.

---

<sup>48</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-jenis Penelitian* (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2007), 220.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan langsung secara lisan dengan informan guna memperoleh keterangan dalam mendukung data yang terkumpul.

Informan yang dipilih sebagai sampel berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau informasi mempunyai relevansi yang erat dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih pertama atau *key informan* kemudian peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan). Hal ini dilakukan dengan maksud agar informasi yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap memahami fenomena yang ada, dan yang dipandang mengerti dan memahami kehidupan individu-individu sebagai anggota masyarakat lokasi penelitian.

Maka dalam penelitian ini penulis memilih informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih pertama atau *key informan* ,diantaranya;

- a. Ibu Siti Dalilah Candrawati selaku ketua PW Asiyah Jatim. Sebagai ketua umum Pimpinan Wilayah Asiyah Jawa Timur, Bu candra tentu memilki kewenangan menyampaikan pendapatnya sebagai perwakilan Aisyiah se-Jawa Timur tentang politik prempuan pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

- b. Ibu Nelly Asnifati selaku sekretaris PWA Jatim. Dipilihnya Bu nelly sebagai salah satu informan untuk menambah data kemudian memperkuat argumentasi Bu Candra tentang politik perempuan pada pilgub Jatim 2018.
- c. Bapak Fajar Muharrom, selaku Dosen Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, juga sebagai pengamat politik. Seorang kader Muhammadiyah, tetapi tidak masuk dalam struktur keanggotaan Pimpinan Wilayah maupun Daerah Muhammadiyah, latar belakang keilmuannya adalah Ilmu Politik. Sering tampil sebagai pemateri kajian yang menyajikan isu-isu sosial politik di Indonesia, lebih-lebih soal politik Muhammadiyah.
- d. Bu Retno selaku anggota Aisyiyah Wonocolo. Dipilihnya Bu Retno sebagai salah satu infoman karena dari beliau lah ide dan gagasan skripsi ini muncul. Berbincang soal Pilgub Jatim lalu mengarah kepada siapa dukungan Aisyiyah Jawa Timur, yang kemudian pernyataanya dipakai peneliti sebagai pemantik pada latar belakang penulisan skripsi.

Selain itu peneliti juga menggunakan teknik *snowball*, dimana pemilihan informan lanjutan dalam rangka penggalan data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman informasi diperoleh atas dasar rujukan atau rekomendasi dari *key informan*.

Kemudian Peneliti mendapat rekomendasi untuk melakukan wawancara, antara lain;

1. Ibu Zubaidah selaku Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Sidoarjo. Beliau juga masuk struktur keanggotaan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur sebagai Sekretaris Majelis Kader. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai ketua koperasi, FMM dan GOW. Bu Zuabaidah adalah informan rekomendasi dari Bapak Fajar.
2. Ibu Dita selaku anggota Aisyiyah Daerah Mojokerto. Bu Dita adalah informan rekomendasi dari Bu Candra. Peneliti diminta menggali data pada Aisyiyah daerah-daerah, kemudian peneliti memilih Bu Dita karena ketua dan sekertaris PDA Mojokerto berhalangan hadir saat itu dan digantikan oleh Bu Dita

## 2. Observasi

Observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam pengamatan ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena Pilgub Jatim 2018. Peneliti mengamati orang-orang yang kesehariannya di PWM Jawa Timur, karena satu lokasi dengan PWA Jawa Timur, melalui bincang dengan mereka membahas perkembangan pilihan politik Muhammadiyah maupun Aisyiyah pada



Pilgub Jawa Timur 2018. Tetapi bukan wawancara. Selain itu, peneliti juga mengikuti perkembangan media dalam memberitakan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mengobservasi dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan sumber data penelitian skripsi ini diantaranya buku, modul, laporan pertanggungjawaban, dan sebagainya.

Dokumentasi digunakan untuk mendukung penguatan data dari hasil lapangan utmuk lebih memahami seperti apa makna politik perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim diperoleh dari majalah walidah.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis berarti menguraikan atau memisah-misahkan, menganalisis data berarti mengurai data atau menjelaskan data kemudian ditarik makna-makna dan kesimpulan.<sup>49</sup> Data yang sudah berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan di lapangan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, 65.

<sup>50</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 134.

Peneliti menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama atau alur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga selesai yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo). Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Dalam hal ini, peneliti harus segera melakukan analisa data melalui reduksi data, ketika peneliti memperoleh data dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak. Adapun hasil dari mereduksi data, peneliti telah memfokuskan pada pemahaman mengenai bagaimana makna politik perempuan PW Aisyiyah Jatim pada Pilgub Jatim 2018.

b. Penyajian data

Terdapat banyak jenis penyajian data diantaranya jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

Dalam mereduksi data, pengambilan catatan dilakukan dengan cara hati-hati, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dengan analisis, ia merupakan bagian dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

c. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam pandangan Miles merupakan sebagian dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis. Makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, dan kecocokannya yang nantinya menjadi validitasnya. Dalam menarik kesimpulan, peneliti

menggunakan pendekatan induktif, yaitu suatu pendekatan dengan mengambil suatu kesimpulan secara umum dari fakta-fakta nyata yang ada di lapangan. Induktif merupakan cara berpikir, dimana ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatukan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

#### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini peneliti memakai keabsahan data sebagai berikut:

##### **1. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan disini berarti teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan ketekunan peneliti dalam kegiatan pengamatan. Ketekunan merupakan sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Pengamatan merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses

biologis (mata dan telinga) serta psikologis (daya adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat).<sup>51</sup>

## 2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangual sumber, teknik, dan waktu.

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal tersebut dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan juga perlu dilakukan, serta perlunya membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen terkait. Dalam penelitian ini penulis mengklarifikasi kepada informan tentang hasil bacaanya di majalah Walidah, selain itu juga di media-media mainstream yang memberitakan soal PWA Jatim
- b. Triangulasi dengan metode. Hal ini dimaksudkan dengan menggunakan metode dengan cara melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran

---

<sup>51</sup> Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 159.

dan kesesuaian data penelitian melalui metode yang berbeda. Terdapat dua strategi yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan menemukan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
- 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Pada penelitian ini, akan dilakukan hal dengan membandingkan data antara di lapangan dengan luar lapangan, dengan perbandingan ini akan memungkinkan peneliti lebih mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. Karena disini peneliti akan memilih data yang akan dijadikan laporan yang berikutnya akan dimasukkan ke dalam laporan penelitian.

---

<sup>52</sup> Husaini, Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 88.

## BAB IV

### AISYIYAH DAN POLITIK PEREMPUAN

#### A. Mengenal Sejarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur dan Perkembangannya

Muhammadiyah yang dipelopori kelahirannya oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 telah merambah ke Jawa Timur pada tahun 1920, yaitu dengan telah berdirinya Muhammadiyah di Surabaya pada 1 November 1921 yang dipelopori Kyai Mas Mansur dan para tokoh lainnya : H. Abdurrahman Usman, H. Abdul Hadi, Bey Arifin, H. M. Anwar Zein, dan H.Usman Muttaqin. Selanjutnya meneguhkan eksistensinya dengan membentuk suatu ikatan kader yang tangguh yang siap menjadi pelopor dan tulang punggung gerakan Muhammadiyah di Jawa Timur dengan nama wali 20.<sup>53</sup>

Keberadaan Aisyiyah di Jawa Timur dapat dilacak sampai ke masa awal pertumbuhan Muhammadiyah itu sendiri sejak tahun 1920-an. Sebagian besar cabang Muhammadiyah membentuk bagian Aisyiyah untuk menangani kegiatan-kegiatan di bidang pembinaan perempuan muslimah serta pendidikan anak-anak. Menurut (BHMHT) 1927, sampai tahun 1927 beberapa cabang dan group Muhammadiyah telah membentuk bagian Aisyiyah, seperti cabang

---

<sup>53</sup> Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, *Sejarah Perkembangan Aisyiyah Jawa Timur* (Surabaya: PWA, 2010), 5.



Surabaya, Ponorogo, Ngawi, Madiun, Pasuruan, Situbondo, Jember, Bondowoso, Malang dan Blitar.

### **Visi Ideal**

Tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.

### **Visi Pengembangan**

Tercapainya usaha-usaha 'Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi mungkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani, yakni masyarakat Islam yang sebenarnya.

### **Misi**

Misi 'Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
2. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam.
4. Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak.

5. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain.
6. Membina AMM Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsong dan penyempurna gerakan 'Aisyiyah.
7. Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian.
8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
9. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup.
10. Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa.
11. Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
12. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

### **1. Dinamika Aisyiyah Jawa Timur**

Meskipun embrio Pimpinan Wilayah Aisyiyah sudah ada seiring berdiri dan berkembangnya Aisyiyah di Jawa Timur, namun dapat dikatakan bahwa Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur berdiri secara

resmi sejak tanggal 2 Muharram 1399 H/20 Maret 1969 M, tetapi baru mendapatkan pengesahan Pimpinan Pusat Aisyiyah pada tanggal 12 Muharrom 1409 H bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 1988 sesuai SK PPA No. 001/PP/A/VIII/1988.

Pertumbuhan awal Aisyiyah di Jawa Timur sangat menggembirakan. Dari hanya memiliki satu cabang (Surabaya) berkembang menjadi beberapa cabang dan grup-grup. Kini Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur memiliki 38 Pimpinan Daerah Aisyiyah (Kabupaten/Kota), 417 Pimpinan Cabang Aisyiyah (Kecamatan), dan 1902 Pimpinan Ranting Aisyiyah (Desa). Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan data jumlah kecamatan dan desa di Jawa Timur sehingga pada periode 2005-2010 ini Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur memprogramkan pendirian Cabang dan Ranting baru di setiap kecamatan dan desa/kelurahan yang belum ada Aisyiyah. Diharapkan pada periode mendatang tidak ada lagi daerah di Jawa Timur yang tidak ada Aisyiyah. Jika dijumlahkan secara keseluruhan anggota Aisyiyah se-Jawa Timur, Pimpinan Wilayah belum memiliki database terkait itu.<sup>54</sup>

“mohon maaf untuk data jumlah anggota Aisyiyah se- Jawa Timur secara angka belum ada databasenya, karena jumlahnya tidak terhitung dan berubah-ubah”

---

<sup>54</sup> Komunikasi dengan Bu Nelly pada 26 Juli 2018.

Untuk perodesasi kepemimpinan Aisyiyah pada awalnya adalah tiga tahun, barulah pada tahun 1985 hasil keputusan Mukhtar menyebutkan bahwa periode kepemimpinan dalam Aisyiyah adalah lima tahun. Dalam tiap periode kepemimpinan selalu ada prioritas program yang diputuskan melalui Musyawarah. Pada awal pendirian prioritas program awal lebih ditekankan pada penataan organisasi seperti penataan struktur organisasi dan struktur pimpinan, pembinaan TK oleh bagian pendidikan dan pengajaran, pengajian remaja putri dan ibu-ibu melalui program da'wah islamiyah dan pembinaan rumah bersalin oleh bagian pembinaan kesejahteraan umat.

Pada periode 1990-1995 Program kerja ditekankan pada kegiatan *Qaryah Thayyibah* sebagaimana keputusan Mukhtar ke 42 di Yogyakarta tahun 1990. Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur menunjuk Pimpinan Daerah Aisyiyah Lamongan sebagai pilot projek. Program *Qaryah Thayyibah* ditekankan pada pembinaan kehidupan Bergama namun tidak mengesampingkan program yang lain seperti program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.<sup>55</sup>

Pada periode 1995-2000 Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur masih melanjutkan program *Qaryah Thayyibah*. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan Departemen Agama dan UNICEF untuk program

---

<sup>55</sup> Ibid, 9.

KIKHA dan BKKBN untuk program keluarga sakinah. Program ini untuk mendukung pelaksanaan *Qaryah Thayyibah*.

Periode 2000-2005 Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk program Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan sosial membina lembaga kesehatan, WCC, dan panti Asuhan. Bagian ekonomi mendirikan 1 koperasi sekunder tingkat Jawa Timur dan 15 koperasi primer tingkat kabupaten se Jawa Timur serta merintis berdirinya IPAS (Ikatan Pengusaha Aisyiyah). Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur juga bermitra dengan Yayasan Cakrawala Timur untuk Program Pendidikan Politik berupa simulasi pemilu dan dialog dengan Calon anggota legislatif perempuan di Lumajang dan Sumenep. Pada tanggal 28 Nopember 2004 Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan Milad Aisyiyah ke 90 Pimpinan Pusat Aisyiyah.<sup>56</sup>

Periode 2005-2010 penekanan program Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur sebagaimana hasil Mukhtamar ke 45 di Malang adalah peneguhan ideologi. Selain itu Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur melebarkan sayap dengan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah, LSM, PT dan *funding* luar negeri untuk menunjang pelaksanaan program kerja organisasi. Masalah politik juga tetap menjadi

---

<sup>56</sup> Ibid, 12.

perhatian Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur karena pada tahun 2009 Indonesia menyelenggarakan pesta politik berupa pemilu legislatif, pilpres dan pilkada.

Hal yang berbeda dari periode sebelumnya adalah adanya kebijakan sentralisasi keuangan dan sinergi program antar majelis. Hal ini dimaksudkan agar semua pimpinan mejelis melaksanakan programnya tanpa ada sekat-sekat dalam batas tertentu sehingga menghasilkan kegiatan yang nyata. Salah satu contoh adalah program *Qaryah Thayyibah*. Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu majelis. Misal majelis Tabligh, tetapi semua majelis terlibat di dalamnya sehingga semua permasalahan yang ada di desa itu dapat teratasi, dan program *Qaryah Thayyibah* dapat berjalan optimal.

## 2. Amal Usaha Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur

Amal Usaha Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota se Jawa Timur antara lain;<sup>57</sup>

Tabel 1.5

### Amal Usaha Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur

Tim Perawatan Jenazah	45
Mushalla	147

<sup>57</sup> Ibid, 13.

Muballighat	771
Kel Pengajian	1298
Desa Binaan	66 desa
Tim Baitul Arqam	38
Tim Aid Band Kader	3
Alumni Baitul Arqam tingkat Madya	65
Alumni Pengkaderan AMM Putri	125
TK	891
TPA	12
PG	497
Sekolah Autis	TK ; 2, SD : 2, SMP : 1
Madrasah diniyah	12
S D	1
TPQ	336
SPS	53
PKBM	8
TBM	4
Kelompok KF	2768
Rumah Sakit	3



RB/BP/BKIA	4
Klinik	2
Panti Asuhan	13
Woman Crisis Center	10
Koperasi Primer	1
Koperasi Sekunder	20
Pra Koperasi	75
Kopwan	142
Rumah Kost	1*

Sumber : Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur Tahun 2010

\*Rumah kost milik Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur sebagai salah satu sumber dana organisasi.

Amal Usaha Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur lainnya yang masih dalam tahap pembangunan adalah Panti Bayi, Rumah Sakit, *Parenting Center*, dan Penitipan Anak.

### 3. Struktur Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah

Periode awal kepengurusan PW Aisyiyah Jatim, posisi ketua kerap kali dijabat oleh orang yang sama. Namun setelah itu mengikuti peraturan yang ada yakni jabatan ketua maksimal hanya 2 (dua) periode. Adapun periode kepemimpinan PW Aisyiyah Jawa Timur periode 2015-2020 yang

tercantum pada SK PPA No. A-2/I/2016 tanggal 27 Rabiul Awal 1437 H/09 Januari 2016 M ditandatangani oleh Siti Dalilah Candrawati (ketua) dan Nelly Asnifati (sekretaris).<sup>58</sup>

Tabel 1.6

Struktur Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur Periode  
2015-2020

Penasehat	dr. Esty Martiana Rachmie
Ketua	Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag
Wakil Ketua I	Dra. Hj. Rukmini
Wakil Ketua II	Dra. Hj. Noer Haidah
Wakil Ketua III	Dr. Hj. Sugiarti, M. Si
Wakil Ketua IV	Sumiati, S. Ag.
Sekretaris	Dra. Hj. Nelly Asnifati
Wakil Sekretaris I	Dr. Akhtim Wahyuni, M. Ag,
Wakil Sekretaris II	Nur 'Aini, S. Pd,
Bendahara	Hj. Heni Mardiningsih, SE

<sup>58</sup> Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, *Aisyiyah Jawa Timur 2015-2020* (Surabaya: PWA Jawa Timur, 2015), 4.

Wakil Bendahara I	Dr. Dra. Hj. Anna Mariana, M. Si. Ak. Ca
Majelis Tabligh	Dra. Hj. Faridah Muwafiq
Majelis Pendidikan Dasar dan menengah	Dra. Hj. Siti Asmah, M. Pd
Majelis Kesehatan	dr. Sophiati Sutjahjani, M. Kes
Majelis Kesejahteraan social	Budiyati, S. Pd
Mejelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Dra. Ec. Tatik Lutfiati, ST
Majelis Pembinaan Kader	Ir. Hafifah Imtihanah
Majelis Hukum dan HAM	Hj. Arini Jauharoh, S.H.,M.Kn
Lembaga Kebudayaan	Dra. Hj. Suharti, M. Psi
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah	Dwi Endang Purwanti. SS

Sumber : Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur periode 2015-2020

#### 4. Aisyiyah Jawa Timur dan Politik

Pengurus Aisyiyah yang berpartisipasi dalam lembaga politik tidaklah sedikit, mereka tersebar menjadi anggota dewan di berbagai instansi. Keberadaan mereka diantaranya menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan dan anggota Departemen Agama dan lain-lain. Adapun saat ini pengurus Pimpinan Wilayah Aisyiyah yang terlibat di politik Jawa Timur sekitar 5-10%.<sup>59</sup>

Sesuai dengan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 03/INS/I.0/A/2008 bahwasanya:

“Kepada Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Persyarikatan jika ada anggota pimpinan/fungsionaris yang menjadi anggota Tim Sukses partai politik dan/atau calon-calon anggota legislatif dari partai politik tertentu maka yang bersangkutan harus dinonaktifkan dari jabatannya sampai selesainya kegiatan Pemilu”.<sup>60</sup>

Aisyiyah yang merupakan organisasi otonom Muhammadiyah sudah jelas harus mematuhi instruksi tersebut. Pengurus Aisyiyah yang telah menjadi bagian dalam lembaga politik mulai dari tingkatan legislatif, eksekutif dan partai politik. Mereka di non-aktifkan dalam kepengurusan Aisyiyah.

---

<sup>59</sup> Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur

<sup>60</sup> Intruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Berikut peneliti menampilkan nama-nama Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur beserta profesinya:<sup>61</sup>

1. Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag  
PNS (Dosen UINSA & anggota MUI Jawa Timur)
2. Dr. Akhtim Wahyuni, M. Ag  
PNS (Dosen UINSA)
3. Hj. Heni Mardiningsih, SE. MM  
PNS (Balai Diklat Keagamaan Kota Surabaya)
4. Asmawatie Rosyidah, SH, M. Pd  
PNS (Balai Diklat Keagamaan Kota Surabaya)
5. Dra. Uswatun Hasanah  
PNS (Guru)
6. Dra. Hj. Siti Asmah, M. Pd.  
PNS (UN Malang)
7. Dr. Hj. Siti Ruchanah, M. Ag  
PNS (Dosen UINSA)
8. Ninik Supriyati, S. Si, M. Pd  
PNS (Balai Diklat Keagamaan Kota Surabaya)
9. Dra. Hindajati  
PNS (Guru)
10. Dewi Maryam, S. Kep, Ns. M. Kep  
PNS (RSU Dr. Soetomo)
11. Sulistyaningsih, Amd. KL  
PNS (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur)
12. Dra. Nurhayati, M. Ag  
PNS (Dosen UINSA)
13. Nurul Barizah, SH

---

<sup>61</sup> Ibid

PNS (Dosen UNAIR)

14. Sri Warjiyati, SH. MH

PNS (Dosen UINSA)

15. Dra. Sri Pratiwiningrum

PNS (Kehakiman Jawa Timur)

16. Putri Aisyiyah Rachma Dewi, M. Kom

PNS (Dosen UNESA)

17. Hj. Heni Mardiningsih, SE

(Departemen Keagamaan Suarabaya, Dekan UMS)

18. dr. Sophiati Sutjahjani, M. Kes

(Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur)

#### **B. Makna Pilihan Politik Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018**

Muhammadiyah sebagai organisasi induk dari Aisyiyah tentu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam pengambilan keputusan dan menentukan pilihan. Sinergitas yang dibangun oleh Aisyiyah sebagai sayap perempuan dari organisasi induknya Muhammadiyah dapat dicermati salah satunya dalam meyakini posisi perempuan di ruang publik, berdasarkan keputusan yang telah dibuat oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang berkenaan dengan itu dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid. Aisyiyah pun sejalan bahwa peranan perempuan dalam politik sangat diperlukan agar perempuan dapat terlibat lebih jauh dalam pengambilan kebijakan. Perempuan yang menjadi kepala daerah

baik menjadi walikota, bupati atau gubernur tidak menjadi suatu hal yang harus dipersoalkan terlebih-lebih dilarang.

Baik NU maupun Muhammadiyah, pemilihan gubernur Jawa Timur adalah satu proses menuju Negara yang demokratis. Setiap warga Negara yang memiliki hak suara harus berpartisipasi sebagaimana mestinya. Muhammadiyah, dalam hal ini menyikapi Pemilihan Gubernur Jawa Timur menyikapi secara baik-baik dan menghimbau kepada masyarakat Muhammadiyah untuk menggunakan hak suaranya kepada pasangan calon dan wakil Gubernur yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan Negara. Dilansir dari SindoNews.com dalam acara Halaqoh Kebangsaan di kantor PWM Jawa Timur. Meskipun belum disampaikan secara resmi, namun sejumlah tokoh Muhammadiyah telah menyatakan dukungannya terhadap Khofifah.

“secara pribadi saya mendukung Bu Khofifah. Karena saya melihat beliau memiliki kapasitas untuk memimpin Jawa Timur, Nah saya melihat, itu (kemampuan) ada pada Bu Khofifah. Hari ini, Bu Khofifah mampu menjadi trisula (ujung tombak) bagi pemerintahan pak Jokowi dalam urusan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan di berbagai pelosok di Indonesia. Maka, ini sangat cocok bagi kebutuhan Jawa Timur”<sup>62</sup>

Pada sisi yang lain, peneliti melihat hubungan PAN dengan Muhammadiyah. PAN resmi mengumumkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang akan diusung di Pilgub Jawa Timur. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilgub Jatim 2018.

---

<sup>62</sup> Pernyataan Zainudin Malik, dikutip dari Sindonews.com, diakses pada 14 Juni 2018.



Sekjen PAN Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa pasangan Khofifah-Emil mampu bersinergi dan menggaet pemilih dari kelompok perempuan dan anak muda. Khofifah dinilai mewakili pemilih dari kelompok perempuan. Sedangkan Emil dianggap mampu menarik suara dari kalangan generasi muda.<sup>63</sup>

Jika selama ini disebut dekat dengan semua partai, tentu PAN memiliki kedekatan khusus dengan Muhammadiyah. Sebetulnya kedekatan khusus itu sudah terbina tanpa perlu dipublikasikan. Hal itu dapat dibuktikan pada setiap perhelatan pileg, pilpres, dan kongres PAN, wacana hubungan PAN dan Muhammadiyah selalu diangkat. Hal yang sama tidak terjadi dengan partai-partai lain. Ini menandakan bahwa PAN dan Muhammadiyah selalu dekat karena itu harus saling menjaga dan membesarkan.

Secara structural tidak ada hubungan organisasi antara Partai Amanat Nasional yang didirikan dan diketuai Amien Rais. Dengan Muhammadiyah yang ketika PAN lahir juga diketuai Amien Rais. Masing-masing independen, otonom dan memiliki bidang kerja sendiri. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri bahwa diantara keduanya memiliki hubungan aspiratif-historis yang begitu erat. Karena dari seorang anak kandung Muhammadiyah lahir seorang inspiratory sekaligus lokomotif reformasi Indonesia, dan akhir Muhammadiyah pulalah yang berbesar hati melepas kadernya untuk berkiprah tidak hanya di

---

<sup>63</sup> Detiknews, diakses pada 10 Juni 2018.

Muhammadiyah saja, tapi juga buat bangsa dan Negara Indonesia dengan mendirikan sebuah partai politik, Partai Amanat Nasional.<sup>64</sup>

Makna Politik Perempuan, baik bagi Muhammadiyah maupun Aisyiyah adalah sama. Namun pilihan politik belum tentu sama. Apabila Muhammadiyah Jawa Timur secara diplomasi menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon nomor satu. Bagi Aisyiyah, pilihan politik tak lagi sama. Pemimpin adalah siapapun yang baik secara agama, kepemimpinan dan pengalaman, serta yang paling penting adalah pemimpin untuk semua kalangan.

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada sidang pleno XII Tanwir I Aisyiyah yang dilakukan di Surabaya berlangsung pada tanggal 19-21 Januari 2018 menampilkan program unggulannya, Jawa timur yang terkenal dengan kemajuan koperasinya menampilkan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK). 38 Pimpinan Daerah Aisyiyah di Jawa Timur, 33 PDA diantaranya sudah memiliki Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah yang kemudian disingkat BUEKA. Sedangkan jumlah koperasi di Jawa Timur sebanyak 355 usaha yang sudah berbadan hukum.<sup>65</sup>

Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah tersebut dikembangkan melalui pengajaran-pengajaran dengan cara mendata ibu-ibu atau daerah mana yang memiliki potensi usaha kecil. Program ini digalakkan dengan tujuan untuk membantu ibu-ibu dengan status janda atau tulang punggung keluarga.

---

<sup>64</sup> Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Ensiklopedia Muhammadiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 21.

<sup>65</sup> Pwmu.co diakses pada 21 Maret 2018.

”Program yang sedang digalakkan saat ini adalah di bidang ekonomi, salah satunya adalah BUEKA, program ini bertujuan untuk membantu ibu-ibu Aisyiyah dalam membuka usaha. Dan program ini yang menjadi paling unggul di Jawa Timur sampai sekarang”.<sup>66</sup>

Selain itu, Aisyiyah juga melakukan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan perempuan, para janda, anak-anak dan lansia.

Kaitannya dengan kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, dilansir dari Merdeka.com, Calon wakil gubernur nomor dua, Puti Guntur Soekarno bersilaturahmi ke Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Timur. Silaturahmi tersebut diterima baik dan langsung oleh Ketua PWA Jawa Timur serta beberapa pengurus lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 60 menit lebih. Dalam pertemuan tersebut Puti menjelaskan program yang berpihak kepada perempuan diantaranya Rembulan Bersinar. Program ini merupakan program keberpihakan kepada perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, Puti juga menceritakan sosok Datok Hasan Din, salah satu kakek buyutnya yang tercatat sebagai tokoh Muhammadiyah di Bengkulu Sumatera Barat. Kemudian neneknya Fatmawati yang merupakan anak Datok Hasan, adalah pengurus Aisyiyah di Bengkulu. Karena itu di mata pengurus Aisyiyah Puti bukan orang asing lagi. Bahkan cucu Proklamator Bangsa Bung Karno ini akan dikukuhkan menjadi keluarga besar Aisyiyah.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Zubaidah, 06 Juni 2018.

Dalam pertemuan tersebut Siti Dalilah mengatakan bahwa pertemuan Aisyiyah dengan Puti Guntur merupakan tanda bahwa Aisyiyah akan memberikan dukungan penuh kepada Puti Guntur. Hal ini karena program yang diusung bersama Syaifullah Yusuf. Kemudian Aisyiyah akan menyamakan persepsi program yang dilaksanakan nanti ke depannya.

“PWA Jatim berdiskusi dengan Puti tentang program kerja. Dari sisi program, PWA Jatim dengan program yang dibawa Puti satu frekuensi karena sudah berjalan selama ini di Aisyiyah”<sup>67</sup>

Bu Candra menjelaskan bahwa program yang dibawa Puti itu sama dengan kegiatan-kegiatan Aisyiyah yang sudah berjalan selama ini. Misalnya, pemberdayaan UMKM pada kaum gender, memperhatikan pendidikan dan persoalan anak serta lansia.

Selain persamaan programnya, kedekatan Aisyiyah dengan pasangan calon nomor dua telah dibangun oleh Syaifullah Yusuf jauh-jauh sebelum Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Sidoarjo mengatakan bahwa

“kedekatan Gus Ipul dengan Aisyiyah itu sudah lama, sejak masih menjabat sebagai wakil gubernur periode kemarin, Gus Ipul sudah dekat dengan Aisyiyah, kemudian beberapa program-programnya juga sama dengan yang dijalankan Aisyiyah sampai sekarang”<sup>68</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Dosen fakultas teknik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo juga sebagai pengamat politik, bahwa Aisyiyah

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Dalilah Candra pada 06 Juni 2018.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ib Zubaidah pada 03 Juni 2018.

dengan Gus Ipul sudah memiliki kedekatan sejak lama. Dan itu menjadi satu point penting bagi Gus Ipul pada Pilgub Jatim ini.<sup>69</sup>

Secara kelembagaan, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon secara khusus, tetapi intruksi yang kemudian di turunkan Pimpinan Daerah se-Jawa Timur untuk disampaikan ke ranting-ranting supaya Aisyiyah menggunakan hak pilihannya kepada pasangan calon yang memiliki keberpihakan dengan Aisyiyah. Dalam artian program kerja dan visi misi.

“kami dihimbau dari pimpinan untuk menurunkan ke bawah agar Aisyiyah memilih pasangan calon yang programnya mendukung dan memiliki kesamaan kepada Aisyiyah.”<sup>70</sup>

Lalu bagaimana bentuk kampanye Khofifah terhadap PWA Jatim? Adakah kesamaan antara program Khofifah-Emil dengan visi misi Aisyiyah.

“Masing-masing calon sudah pasti punya program terkait keperempuanan, saya kira Bu Khohfifah sangat paham sekali persoalan-persoalan perempuan yang belum teratasi di Jawa Timur karena beliau juga dulu jadi Menteri sosial, tapi memang belum ada kesempatan bertemu dengan Bu Khofifah pada pilgub ini”<sup>71</sup>

Dalam sebuah wawancara peneliti kepada Ibu Zubaidah selaku ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Sidoarjo, didapat sebuah informasi bahwa disamping adanya kedekatan Aisyiyah dengan Gus Ipul, sisi lain mengatakan adanya hubungan yang tidak baik antara Khofifah dengan Aisyiyah. Hal tersebut yang kemudian berdampak pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Fajar Muharrom pada 03 Juni 2018.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Zubaidah pada 03 Juni 2018.

<sup>71</sup> Ibid

“Kami dari Aisyiyah menyambut baik atas pencalonan Khofifah sebagai calon Gubernur Jawa Timur, tetapi harus untuk semua kalangan, tidak boleh berpihak ke satu golongan saja. Kalau jadi gubernur ya harus jadi gubernur untuk seluruh umat”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara dan temua-temuan, peneliti melihat kemandirian Aisyiyah untuk menentukan pilihan politiknya. Sebagai Organisasi perempuan Muhammadiyah, tidak lantas menjadikan Aisyiyah meyamakan pilihan politiknya. Bagi Aisyiyah pemimpin yang baik adalah yang program kerjanya berpihak pada masyarakat luas, berlaku untuk semua kalangan, sejalan dengan program yang dijalankan Aisyiyah selama ini, dan kepentingannya untuk kesejahteraan umat.

Secara definitif Weber merumuskan Sosiologi sebagai suatu ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal.

Kegiatan-kegiatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur sebelum pemilihan Gubernur Jawa Timur adalah interaksi sosial merupakan inti dari penelitian ini, dimana dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber dalam teorinya membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe yaitu sebagai berikut: Dalam teori tindakan sosial ini terdapat teoritisi tindakan sosial yang diarahkan kepada orang lain atau kelompok. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek semata tanpa dihubungkannya dengan

---

<sup>72</sup> Ibid

tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Jadi kegiatan yang di adakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur sebelum pemilihan gubernur Jawa Timur adalah merupakan tindakan sosial. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial Weber membedakannya ke dalam empat tipe, berikut empat tipe tindakan Weber :

1. Tindakan rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*).
2. Tindakan rasional nilai (*Werk Rational*).
3. Tindakan afektif (*Affectual Action*)
4. Tindakan tradisional (*Traditional Action*)

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur sebelum pemilihan gubernur Jawa Timur seperti: mengadakan sosialisasi yang bersinergi dengan KPU Jatim, silaturahmi dengan Puti Guntur Soekarno, mengajukan *policy brief* tentang keberempuan-an, menghadiri diskusi bersama kedua pasangan calon gubernur Jawa Timur.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur sebelum Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 adalah termasuk tindakan sosial, dari data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan empat tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber, kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam tipe yang pertama, yaitu tindakan instrumental, tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan atas pilihan sadar



atas pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang di pergunakan untuk mencapainya, kegiatan ini tak lain adalah bertujuan untuk membangun interaksi sosial yang baik, sosialisasi dengan KPU Jatim menjelang Pilgub Jatim 2018. Selain itu, penerimaan PWA Jatim atas kedatangan Puti Guntur dalam rangka silaturahmi dengan Aisyiyah pada kampanye Pilgub Jatim 2018.

Kemudian juga masuk dalam tipe tindakan yang kedua, yaitu tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya disini tindakan ini telah di pertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama dan nilai yang masyarakat miliki. Dalam hal ini, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim mengajukan *policy brief* kepada pasangan Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, salah satu usulan kebijakannya adalah masalah ekonomi.

Kemudian pada tipe ketiga, Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Dalam hal ini, kedekatan Aisyiyah dengan Syaifullah Yusuf jauh sebelum Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Dikutip dari wawancara peneliti kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah Sidoarjo, Aisyiyah secara lembaga memiliki konflik lama dengan Khofifah.

“sejak Bu Khofifah menjadi menteri sosial, tidak pernah sama sekali mengajak Aisyiyah dalam melaksanakan programnya, selain itu ketika diundang ke acara Aisyiyah, beliau tidak datang tanpa konfirmasi. Beberapa programnya Aisyiyah ketika masih menjadi menteri juga dipotong dan diberikan ke Muslimat, padahal kalau jadi menteri harusnya jadi menteri untuk semua kalangan”<sup>73</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Fajar Muharrom, seorang dosen di Universitas Sidoarjo sekaligus seorang pengamat politik. Bahwa ketidaksesuaian Aisyiyah dengan Khofifah itu sudah berlangsung sejak lama, dan itu tentu saja berdampak pada proses Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Dalam Tanwir I Aisyiyah yang berlangsung di Surabaya pada bulan Januari kemarin, Pimpinan Pusat Aisyiyah secara diplomatis mengintruksikan agar jamaah Aisyiyah memilih gubernur yang berpihak kepada Aisyiyah.

Pada kesempatan yang lain, saat Milad muslimat di Sidoarjo. Pimpinan Daerah Aisyiyah Sidoarjo menjadi tamu undangan bagi Muslimat pada saat itu. Dalam pidatonya, Khofifah selaku pengisi ceramah menyampaikan beberapa hal yang secara tidak sengaja menyinggung Aisyiyah, yang notabennya bagian dari Muhammadiyah.<sup>74</sup>

“Bulan Ramadhan sudah dekat, masjidnya dijaga. Jangan sampai masjid ini dimasuki oleh orang-orang yang rakaat terawihnya hanya 11 rakaat”

Pada tipe keempat, tindakan tradisional, tindakan yang di lakukan karena kebiasaan, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur mengadakan pengajian-pengajian yang dihadiri oleh Jamaah Aisyiyah.

---

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Zubaidah pada 06 Juni 2018.

Mencermati kegiatan Aisyiyah dalam politik adalah dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas yakni agar masyarakat, khususnya kaum perempuan agar lebih berpikir kritis dan terbuka terhadap politik.

Adapun dalam Muhammadiyah ketika memerankan posisi politiknya tidak lebih disebut dengan politik nilai yaitu politik untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini Aisyiyah yang secara diplomasi mengajak jamaahnya untuk lebih memilih Gus Ipul adalah karena program-programnya sesuai dengan visi dan misi Aisyiyah yang sudah berjalan sampai sekarang.<sup>75</sup>

Perjuangan perempuan memperoleh kesetaraan dilakukan disegala bidang, termasuk hak politiknya. Analisis ilmu politik, prosentase perempuan lebih besar dalam komposisi demografi sebenarnya menguntungkan perempuan memperoleh hak politik dan terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kenyataannya, jumlah anggota legislatif perempuan sangat sedikit.

Faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik perempuan adalah peningkatan kualitas pribadi perempuan melalui pendidikan; kemandirian ekonomi yang memunculkan kepercayaan diri (dicirikan dengan bekerja dan memiliki penghasilan pribadi); aktif dalam ormas; terkikisnya budaya patriarki dan penafsiran sempit terhadap ajaran agama oleh modernisasi; dan penerapan sistem politik yang terbuka/demokratis dan kebijakan *affirmative action*

---

<sup>75</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Aib Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Juxtapose, 2007)

Kesebelas, factor-faktor penghambat partisipasi politik perempuan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi personal perempuan; rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban politik; tidak mandiri secara ekonomi; inferioritas perempuan terhadap laki-laki; budaya patriarkhi yang masih kental; dan penafsiran ajaran agama yang sempit tentang pemimpin perempuan.

### **C. Sosialisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pilgub Jawa Timur 2018**

Usia Aisyiyah yang saat ini sudah menjelang satu abad yang lahir sebelum republik ini berdiri telah memiliki banyak pengalaman dalam mengabdikan kepada masyarakat. Organisasi Aisyiyah telah berhasil melewati fase-fase perkembangan dan sejarah Indonesia, sejak masa penjajahan oleh Belanda, Jepang, kemudian era orde baru dan reformasi saat ini. Kelahiran Aisyiyah tidak bisa dilepaskan dari harapan dan tujuan agar kaum perempuan dapat berkiprah di ruang publik, namun bukan berarti harus mengabaikan wilayah domestik.

Program-program yang nyata di masyarakat mengenai peran Aisyiyah sejak berdirinya hingga saat ini diantaranya di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Aisyiyah juga turut serta mengajarkan kesadaran perempuan dalam politik sebagai responsivitas perubahan dan isu zaman.

Menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 Aisyiyah telah terlibat aktif dalam kegiatan politik. Kegiatan tersebut diekspresikan melalui diskusi politik. Aisyiyah memberikan penerangan tentang pemilihan umum kepada masyarakat baik secara lisan lewat pengajian-pengajian, rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Aisyiyah.

“Aisyiyah tetap berpartisipasi aktif untuk melakukan kesadaran politik bagi masyarakat umum, khususnya jamaah Aisyiyah. Biasanya dalam pengajian-pengajian atau rapat-rapat tertentu yang diadakan Aisyiyah”<sup>76</sup>

Majalah *Walidah* Aisyiyah Mei-Juni 2018 memuat artikel kegiatan pemberdayaan politik perempuan yang dilaksanakan melalui diskusi politik. Tujuan diskusi politik tersebut adalah untuk mencerdaskan kader sebelum memberikan hak suaranya kepada salah satu pasangan calon pimpinan.<sup>77</sup> Diskusi tersebut juga sekaligus sosialisasi pentingnya turut serta untuk memberikan hak suaranya sebagai warga Negara Indonesia yang baik.<sup>78</sup> Selain itu, Aisyiyah juga bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Pada kesempatan yang lain, PWA juga pernah menghadiri undangan dialog bersama dua pasangan calon.

Fenomena kehadiran perempuan di ruang publik masih menjadi kritikan oleh sebagian kalangan masyarakat. Wilayah perempuan yang hanya boleh di

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Nelly Asnifat pada 03 Juli 2018.

<sup>77</sup> Pernyataan Ibu Siti Dalilah yang dimuat di majalah *Walidah* No.83, Mei-Juni 2018. Dalam *kader Aisyiyah Wajib Melek Politik*. (Suarabaya: PWA Jawa Timur, 2018) , 11.

<sup>78</sup> *Walidah*, No. 83, Mei-Juni 2018. Dalam *kader Aisyiyah Wajib Melek Politik*. Dalam *kader Aisyiyah Wajib Melek Politik*. (Suarabaya: PWA Jawa Timur, 2018) Hal 11

dapur masih menghantui pola pikir sebagian masyarakat kita yang masih patriarkal. Padahal mencermati lebih jauh sejauhmana hasil pembangunan saat ini yang masih kurang berpihak pada kaum perempuan yang justru membutuhkan suara perempuan itu sendiri dalam proses pengambil kebijakan dalam struktur kekuasaan baik di level mikro maupun makro.

“Peranan perempuan dalam politik itu perlu, karena perempuan perlu diakomodir aspirasinya untuk kemajuan umat dan bangsa. Dan tidak ada larangan selama itu tetap membawa visi dan misi kemaslahatan umat, bangsa dan Negara”<sup>79</sup>

Pandangan Aisyiyah tentang peran politik perempuan dapat dicermati berdasarkan keputusan yang telah dibuat oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang berkenaan dengan itu dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid. Ketika pandangan patriarki masih sangat kental dalam kultur masyarakat Indonesia dan diskursus-diskursus jender belum mengemuka saat ini. Pada tahun 1976 Muhammadiyah melalui lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan keputusan tentang kedudukan perempuan dalam politik atau lebih tepatnya kedudukan perempuan Muslim dalam politik yang terhimpun dalam Adabul Mar’ah fil Islam. Berlandaskan firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya :

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh akan kebajikan dan melarang dari kejahatan; mereka mendirikan shalat, mereka mengeluarkan zakat. Dan mereka taat/patuh kepada Al-quran dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Candra pada 06 Juli 2018.

Pengertian mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan yang dimaksud dalam ayat di atas mencakup dalam segala hal termasuk soal politik dan ketatanegaraan, karena bisa saja suatu waktu kaum perempuan diperlukan untuk turut serta memecahkan persoalan-persoalan bangsa dalam ketatanegaraan.<sup>80</sup> Baik perempuan maupun laki-laki memiliki tugas dan kewajibannya yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai warga Negara memiliki kewajiban untuk turut serta membantu kesejahteraan masyarakat, baik jalur lembaga politik formal atau konsep Qoryah Thoyyibah seperti yang telah dilakukan oleh Aisyiyah selama ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua PWA Jatim pada wawancara tertulisnya.

“Perempuan dalam hal ini (Asyiyah) sejak 1917 sudah mengambil peran sosial, khususnya untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar”<sup>81</sup>

Adapun hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, *Tidak akan menang kaum perempuan yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*. Menurut Din Syamsudin pandangan ini karena dipengaruhi budaya arab yang didominasi laki-laki, sehingga mempengaruhi Negara-negara muslim untuk menolak kehadiran atau tampilnya perempuan dalam wilayah kehidupan politik.<sup>82</sup> Hadits di atas yang terkesan menyudutkan kaum perempuan untuk

<sup>80</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid, *Adabul Mar'ah Fil Islam* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 71.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Candra pada 06 Juli 2018.

<sup>82</sup> Din Syamsyudin dalam Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati, *Wacana Fiqih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2005), 44.



menjadi pemimpin menurutnya haruslah dipahami secara jernih dan lebih mendalam dengan melihat latar belakang (Asbabul Wurud) dari hadits tersebut. Dikeluarkannya hadits tersebut merupakan repon nabi Muhammad terhadap Raja Persia yang akan mengangkat puterinya sebagai pengganti atau penerus kepemimpinan ayahnya (Raja Persia) tersebut.<sup>83</sup> Pernyataan Nabi tersebut karena berdasarkan pengetahuan beliau tentang ketidakmampuan Sang Puteri dalam mengurus urusan kenegaraan yang kompleks dan berat.

Keputusan Majelis Tarjih yang terhimpun dalam *Adabul Mar'ah fil Islam* tersebut memberikan apresiasi dan afirmasi bahwasannya perempuan boleh menjadi pemimpin. Perempuan boleh menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat lurah, menteri, walikota dan sebagainya.<sup>84</sup>

Menurut Syamsul Anwar peran politik perempuan yang dirumuskan dalam *Adabul Mar'ah fil Islam*, dalam menilai peranan wanita dalam politik dapat dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. Peranan yang langsung terjun dalam politik praktis dalam lembaga-lembaga politik formal, mulai dari tingkatan legislatif yakni DPR dari pusat sampai daerah.

---

<sup>83</sup> Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati, 44.

<sup>84</sup> Ibid,50.



2. Peranan tidak langsung, yaitu kegiatan yang disalurkan dari rumah tangga dengan turut berperan aktif dalam mengisi kesempatan-kesempatan bermanfaat di dalam masyarakat.<sup>85</sup>

“Kondisi wanita di Indonesia sebagian besar belum mendukung peran sertanya dalam pembangunan. Masih jutaan yang buta atau setengah buta huruf, sebagian dari tenaga kerja wanita adalah buruh rendah. Kesiapan fisik, mental, perlengkapan keterampilannya masih jauh dari standar yang diminta. Kelompok wanita yang duduk sebagai penentu kebijaksanaan masih sangat kecil.”<sup>86</sup>

Kutipan di atas merupakan salah satu gambaran kondisi perempuan saat ini. Berangkat dari kondisi ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan saat ini, maka wacana dan gerakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik banyak bermunculan. Dalam menyikapi perkembangan ini, Aisyiyah pun sejalan bahwa peranan perempuan dalam politik sangat diperlukan agar perempuan dapat terlibat lebih jauh dalam pengambilan kebijakan. Perempuan yang menjadi kepala daerah tidak menjadi suatu hal yang harus dipersoalkan terlebih-lebih dilarang. Perempuan yang duduk dalam lembaga politik, baik sebagai kepala daerah atau anggota dewan adalah mereka yang benar-benar memiliki kompetensi dan sense of gender akan kebutuhan masyarakat serta bukan karena suaminya.

Mengkaji peran politik perempuan saat ini, kemunculan figure perempuan yang mengajukan diri Milan perempuan di bidang politik. Aplikasi dari

---

<sup>85</sup> Ibid, 49.

<sup>86</sup> Maftuchah Yusuf, *Perempuan Agama dan Pembangunan, Wacana Kritik atas eran dan Kepemimpinan Wanita* (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi, 2000),21.



lahir kebijakan yang sensitif gender sehingga nantinya hasil dari pada kebijakan tersebut benar-benar dapat dirasakan secara adil kepada masyarakat.

“Dari calon perempuan ini akan lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan perempuan. Selain itu, kesadaran hak berpolitik bagi perempuan juga sudah digalakkan. Isu-isu perempuan juga bukan hal yang sedikit, namun masih banyak, misalnya pernikahan dini, kesehatan reproduksi yang kemudian hal itu yang lebih paham adalah perempuan. Meskipun laki-laki juga paham, tapi tetap saja yang jauh lebih paham persoalan-persoalan itu adalah perempuan”<sup>89</sup>

Seperti yang telah ditegaskan oleh KH Ahmad Dahlan bahwasannya urusan dapur jangan dijadikan penghalang untuk berkiprah di ruang publik bagi perempuan. „Aisyiyah berpandangan bahwa ajaran Islam tidak melarang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dan mengenai urusan rumahtangga bukan tanggungjawab seorang istri saja namun tanggungjawab bersama (suami dan istri).

Menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mengadakan sosialisasi Pemilu Jatim 2018.

Selain itu, pada Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) I Aisyiyah, Aisyiyah memberikan partisipasinya terhadap politik dengan membuat seminar tentang diskusi politik sebelum pemilihan gubernur Jawa Timur (pilgub) 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dalam diskusi politik tersebut ketua PWA Jatim Ibu Dalilah menyampaikan bahwa sebagai warga

---

<sup>89</sup> Ibid



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai makna politik perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dapat disimpulkan yaitu, pertama Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur berpandangan bahwa tidak ada larangan dalam ajaran Islam bagi perempuan untuk menjadi kepala daerah bahkan kepala Negara sekalipun. Kiprah perempuan yang berperan di ruang publik bagi Aisyiyah perempuan tersebut harus tetap dapat membagi perannya di ruang domestik. Pandangan Aisyiyah tentang peran politik perempuan dapat dicermati berdasarkan keputusan yang telah dibuat oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang berkenaan dengan itu dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid.

Kedua, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan politiknya, tidak mengikuti organisasi induknya, Muhammadiyah. Secara diplomasi mendukung Pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Hal tersebut dianalisis menggunakan empat tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber, kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam tipe yang pertama, yaitu tindakan instrumental, tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan

seseorang didasarkan atas pilihan sadar atas pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang di pergunakan untuk mencapainya, kegiatan ini tak lain adalah bertujuan untuk membangun interaksi sosial yang baik, sosialisasi dengan KPU Jatim menjelang Pilgub Jatim 2018. Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur juga melaksanakan diskusi politik jelang Pilgub Jawa Timur 2018 yang dihadiri oleh Pimpinan Wilayah pada Musyawarah Pimpinan Wilayah (Musypinwil I). Selain itu, penerimaan PWA Jatim atas kedatangan Puti Guntur dalam rangka silaturahmi dengan Aisyiyah pada kampanye Pilgub Jatim 2018. Dalam tipe tindakan yang kedua, yaitu tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya disisni tindakan ini telah di pertimbangan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama dan nilai yang masyarakat miliki. Dalam hal ini, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim mengajukan *policy brief* kepada pasangan Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, salah satu usulan kebijakannya adalah masalah ekonomi. Tipe ketiga, Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Dalam hal ini, kedekatan Aisyiyah dengan Syaifullah Yusuf jauh sebelum Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Kemudian kesenjangan hubungan antara Khofifah dan Aisyiyah yang disebut-sebut konflik sejak Bu Khofifah menjeadi menteri sosail dan pemberdayaan.

Pada tipe keempat, tindakan tradisional, tindakan yang dilakukan karena kebiasaan, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur mengadakan pengajian-pengajian yang dihadiri oleh Jamaah Aisyiyah.

Ketiga, sosialisasi yang dilakukan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur, diantaranya bersinergi dengan Komisi Pemilihan Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi Pilgub Jawa Timur. Selain itu, pada Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah I (Musypinwil), Aisyiyah memberikan partisipasinya terhadap politik dengan membuat seminar tentang diskusi politik jelang pemilihan gubernur Jawa Timur (pilgub) 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Kemandirian Pimpinan Wilayah Aisyiyah dalam pilihan politiknya pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 didasarkan pada program dan visi misi Aisyiyah. Politik yang megedepankan asas kesejahteraan umat dalam Muhammadiyah disebut politik nilai. Kemudian, itu yang menjadi alasan Aisyiyah memiliki pilihan meskipun berbeda dengan pilihan organisasi induknya.

## **B. Saran**

Pada penelitian ini yang berjudul Makna Politik Perempuan bagi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 bisa dikatakan belum komprehensif, karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Institutionalisme, pendekatan ini memfokuskan institusi







- Johannes Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Koiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.
- Maftuchah Yusuf, *Perempuan Agama dan Pembangunan, Wacana Kritik atas eran dan Kepemimpinan Wanita* Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi, 2000.
- Majlis Tarjih dan Tajdid, *Adabul Mar'ah Fil Islam* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Mas'oed, Mohtar, *Perbandingan Sistem Politik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Mirriam budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta:PT Gramedia pustaka Utama, 2008.
- M. Irfan Islamy, *Policy Analysis : Seri Monografi Kebijakan Publik*, Malang: University Brawijaya, 2000.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-Jenis Penelitian* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana prenatal Media Group 2011.
- Nunuk P Muniarti, *Getar Gender*, Magelang: IndoesiaTara, 2004.

- Olvi Pristiana, Zulminarti, dan Chamsiah Djamal, *Wanita dan Organisasi*, Toeti Herati dan Aida Vitalaya S. Hubies, *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional*, dalam A. Adaby Darban, *Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal* Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM, 2010.
- Peter Schroeder, "*Strategi Politik*", Jakarta:Frederich-Nauman-Stiftung Fiur die Freiheit, 2013.
- Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, *Sejarah Perkembangan Aisyiyah Jawa Timur* Surabaya: PWA, 2010.
- Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, *Aisyiyah Jawa Timur 2015-2020* Surabaya: PWA Jawa Timur, 2015.
- Pucuk Pimpinan Muslimat NU, *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama, Negara, dan Bangsa*, Jakarta: PP Muslimat NU, 1996.
- Ritzer, G dan Goodman Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rush, M. Dan Althof. P, *Pengantar Sosilogi Politik* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieka Cipta: Jakarta, 1996.
- Sutinah, *Handout Metodologi Penelitian Sosial*, Balai Pustakan: Surabaya, 2006.



